

ABSTRAK

Pritha Marhaeny Wibowo. NIM 18107280. ***KEKUATAN HUKUM KWITANSI JUAL BELI TANAH DALAM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA HAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kab.Kediri Nomor 252/Pid.C/2021/PN Gpr)***. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri. Adanya skripsi ini ditulis oleh penulis, yaitu bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum kwitansi jual beli tanah. Penelitian yang kemudian materi-materi tersebut penulis jadikan sebagai acuan tambahan dalam menganalisis putusan hakim terhadap Terdakwa yang bernama MAT EKRAM BIN ALM. MAT KARIM sebagai pelaku tindak pidana penggunaan tanah tanpa hak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dalam rangka menentukan sanksi yang tepat untuk diterapkan.

Penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan normatif serta studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis data yang diperoleh berupa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 252/Pid.C/2021/PN Gpr.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya hakim dinilai tepat dalam menerapkan sanksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan hakim juga telah tepat dalam mewujudkan tujuan hukum yang, pertama keadilan hukum; kedua kemanfaatan hukum; dan ketiga kepastian hukum.

Oleh sebab itu penting dibuatnya skripsi ini, yaitu agar penguatan norma hukum di Indonesia dapat diwujudkan demi tercapainya cita-cita keadilan, sehingga dapat mencerminkan suatu sistem hukum yang dapat melindungi hak-hak pembeli tanah. Penulis merekomendasikan kepada masyarakat agar lebih teliti dalam proses jual beli tanah agar memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka dengan ini juga penulis menyarankan bagi penegak hukum untuk memberikan sekiranya edukasi dan penyuluhan tentang pendaftaran tanah atau proses jual beli tanah yang terhindar dari sengketa di masa depan dan juga agar memberikan kepada pembeli tanah kekuatan hukum yang kuat dan bukti autentik.

Kata Kunci: Kwitansi Jual Beli Tanah, Barang bukti, Penggunaan tanah tanpa hak

ABSTRACT

Pritha Marhaeny Wibowo. NIM 18107280. *LEGAL STRENGTH OF LAND BUYING RECEIPT IN CRIMINAL ACTS OF LAND USE WITHOUT AUTHORIZATION (Study Of District Court Of Kediri District Number 252/Pid.C/2021/Pn Gpr)*. Law Studies Program, Faculty of Law, Kadiri University. The existence of this thesis was written by the author, which aims to analyze the legal strength of the land sale and purchase receipt. In this research, the authors use these materials as an additional reference in analyzing the judge's decision against the Defendant named MAT EKRAM BIN ALM. MAT KARIM as the perpetrator of the crime of using land without rights at the Kediri District Court, in order to determine the appropriate sanctions to be applied.

In this research, the method used by the author is to use a descriptive analysis method, using a normative approach and library research, namely by conducting research on legislation as the object of research, which is associated with legal theories. Likewise the law in its implementation in society, which relates to the object of research. After the data was obtained, the authors analyzed the data obtained in the form of the Kediri District Court Decision Number 252/Pid.C/2021/PN Gpr.

Based on the results of this study, it can be concluded that the judge is considered appropriate in applying the sanctions that have been carried out by the Defendant because the Defendant's actions have fulfilled the elements based on the applicable law, and the judge has also been right in realizing the legal objectives, namely legal justice; both legal benefits; and thirdly legal certainty.

Therefore, it is important to make this thesis, namely so that the strengthening of legal norms in Indonesia can be realized in order to achieve the ideals of justice, so that it can reflect a legal system that can protect the rights of land buyers. The author recommends to the public to be more careful in the process of buying and selling land in order to have strong legal force, so with this the author also recommends law enforcers to provide education and counseling about land registration or the process of buying and selling land that avoids future disputes and also to provide land buyers with strong legal force and authentic evidence.

Keywords: Land Purchase Receipt, Evidence, Unauthorized use of land